

ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR DALAM SUDUT PANDANG REALISME

Ardita Sifana Aulia Amry¹, Kin Sara Nauti²

2210631260050@student.unsika.ac.id¹, 2210631260007@student.unsika.ac.id²

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 telah menimbulkan kekacauan politik dan sosial di negara tersebut. Dalam sudut pandang realisme, kudeta ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari dinamika kekuasaan dan kepentingan negara yang mendasar. Teori realisme, yang berfokus pada negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional serta pengutamaan kepentingan nasional dan keamanan, dapat menjelaskan tindakan militer Myanmar sebagai upaya untuk mempertahankan kontrol dan stabilitas internal. Kudeta ini juga merefleksikan prinsip dasar realisme yang menekankan bahwa konflik dan persaingan kekuasaan adalah fenomena alami dalam politik internasional. Militer Myanmar, dengan mempertimbangkan ancaman terhadap posisinya, memandang pengambilalihan kekuasaan sebagai cara untuk mengamankan kepentingannya dalam menghadapi tantangan dari pemerintahan sipil dan tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kudeta tersebut bukan hanya persoalan domestik tetapi juga terkait dengan kepentingan internasional, termasuk respon dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan anggota ASEAN, yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda terhadap perkembangan politik Myanmar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kudeta militer Myanmar melalui pendekatan teori realisme, yang akan mengeksplorasi dinamika internal dan eksternal serta relevansinya terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kudeta militer Myanmar, realisme, kekuasaan, kepentingan nasional, stabilitas politik.

PENDAHULUAN

Myanmar adalah negara berkembang yang merdeka dari era kolonialisme Inggris pada 4 Januari 1948. Myanmar menjalankan pemerintahan demokrasi parlementer hingga pada tahun 1962 terjadinya pergantian kekuasaan secara kudeta atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh rezim junta militer Myanmar Tatmadaw. Pada sejarahnya, kudeta militer Myanmar diawali oleh Jenderal Ne Win yang mengubah struktur pemerintahan Myanmar, mulai dari segi politik, pemerintahan hingga perekonomian negara. Setelah rezim militer berkuasa, pemerintah menghapus partai-partai oposisi dan hanya mengesahkan satu partai politik, yaitu Burmese Socialist Program Party (BSPP) atau dikenal sebagai Partai Lenin di mana mayoritas anggotanya adalah golongan militer (Hnin, 2014). Hal tersebut menggambarkan bahwa pihak militer tidak bisa lepas dari keinginan untuk menginjakkan kaki di bidang politik secara terang-terangan.

Rezim junta militer masih berdiri kokoh hingga pada tahun 1990, di mana pemerintahan Myanmar mengadakan pemilu atas aksi demonstrasi mahasiswa dan tanggapan atas surat terbuka Aung San Suu Kyi, sang tokoh demokratisasi Myanmar. Demonstrasi dengan jumlah besar itu dikenal sebagai “8888 Uprising” (Garmabar, 2021). Setelahnya pemilu dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990 dan partai yang didirikan Aung San Suu Kyi bersama tokoh pro-demokrasi lainnya memenangkan suara rakyat secara mutlak sebesar 80,82%. Namun, pemerintahan junta militer tidak menerima fakta tersebut dan melakukan kudeta kedua kalinya dengan melakukan penahanan rumah terhadap Aung San Suu Kyi dan para tokoh pro-demokrasi lainnya yang dianggap sebagai pemberontak dan penyebab dari ketidakstabilan politik Myanmar (Puspita, 2013). “8888 uprising” dan hasil pemilu tahun 1990 di Myanmar menandai titik balik dalam sejarah negara tersebut.

Fakta bahwa junta militer tidak ingin mengakui hasil pemilu ini menunjukkan betapa sulitnya perjuangan demokrasi di tengah tekanan otoriter. Aung San Suu Kyi, sebagai simbol perjuangan demokrasi, dan para tokoh pro-demokrasi yang ditahan harus diakui keberaniannya dalam menghadapi ketidakadilan. Kudeta yang dilakukan pemerintah militer Myanmar mengindikasikan bahwa junta militer mengabaikan hak-hak asasi manusia dan mengabaikan keinginan masyarakat untuk mendirikan negara demokrasi.

Proses demokratisasi Myanmar kembali dilakukan pada 2010 dan pada tanggal 4 Februari 2011 Thein Sein diangkat menjadi presiden sipil pertama Myanmar oleh Parlemen Myanmar setelah kemenangan partai Union Solidarity and Development Party (USDP). Akan tetapi terjadi kudeta lagi, tepatnya 1 Februari 2021 oleh militer Myanmar dipimpin panglima tertinggi Min Aung Hlaing. November 2020 lalu Myanmar mengadakan pemilu, dan hasil menyatakan bahwa Aung San Suu Kyi dan partainya yaitu National League for Democracy (NLD) pro-demokrasi memenangkan kursi parlemen sebanyak 346, lebih dari 322 kursi yang diperlukan untuk membentuk parlemen (BBC Indonesia, 2020). Pihak militer Myanmar menuduh pihak oposisi melakukan kecurangan dan manipulasi hingga pada akhirnya Aung San Suu Kyi kembali ditangkap dan pemerintahan militer mengalami repetisi masa junta militer yang berlandaskan otoriter. Penuduhan dan penangkapan tersebut bisa dilakukan meski tanpa bukti konkret.

Aksi demonstrasi penolakan kudeta militer Myanmar membawa amarah dan lonjakan kekecewaan masyarakat Myanmar. Kondisi Myanmar kala itu tidak terhindar dari kerusuhan berujung korban nyawa dan kerusakan material. Sudah diketahui pasti bahwa militer Myanmar memiliki keunggulan mutlak dari berbagai ancaman masyarakat Myanmar. Pihak militer diketahui aksi demonstrasi warga Myanmar dengan aparat militer menewaskan sekitar 3.000 sampai 10.000 nyawa warga sipil, namun pemerintah Myanmar hanya melakukan klaim korban nyawa sebanyak 350 orang (Garmabar, 2021). Pihak internasional menaruh atensi penuh dan Myanmar mendapat sorotan publik dunia atas tindakannya. Tindakan kudeta yang melanggar HAM ini mendapat desakan serta kecaman keras dari organisasi internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, yaitu Michelle Bachelet mengutuk keras tindakan junta militer Myanmar yang melakukan eksekusi hukuman mati terhadap empat aktivis demokrasi Myanmar yang dinilai mengabaikan hak asasi manusia. Hukuman mati dijatuhkan pada 21 Januari, meski sempat mengajukan ajukan banding, namun pernyataan tersebut ditolak (Anadolu Agency Indonesia, 2022). Sanksi lain datang dari negara adidaya Amerika Serikat, menurut Staf Ahli Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Derek Chollet, bahwa akan ada sanksi tambahan untuk militer Myanmar. Pihak Amerika Serikat sudah menjatuhkan sanksi untuk 80 orang dan 32 badan hukum Myanmar yang dianggap membantu pihak junta mendanai operasional junta untuk pembelian senjata. Namun, sangat disayangkan mengetahui fakta bahwa penghentian pasokan senjata ke junta militer menghadapi tantangan besar karena pihak junta membeli persenjataan dari Rusia. Akibatnya, permintaan embargo senjata dari pihak Amerika Serikat terhadap PBB sulit dilakukan karena Rusia bisa menggunakan hak VETO. Maka langkah yang bisa dilakukan Amerika adalah membangun kerja sama dengan negara di kawasan dan global untuk menekan aliran senjata Myanmar. Bisa dikatakan bahwa pembelian senjata Myanmar terhadap Rusia cukup membuat Amerika Serikat dan PBB tidak bisa berkutik banyak karena hak VETO Rusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan militer Myanmar mampu membungkam desakan pihak-pihak internasional yang menentang tindakan kudetanya.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional

kawasan Asia Tenggara juga sebagai wadah dari negara Myanmar sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi kekejaman militer Myanmar. Perlu diketahui bahwa ASEAN memiliki prinsip fundamental, salah satunya yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa anggota ASEAN tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah internal negara anggota lain. ASEAN turut memberikan tekanan melalui kebijakan bernama Constructive Engagement. Kebijakan ini dikeluarkan ASEAN tahun 1991 yang disebut sebagai ASEAN's way untuk mendorong demokratisasi Myanmar. Kebijakan ini mengimplementasikan sikap-sikap persuasif seperti promosi demokrasi tanpa kekuatan militer atau embargo untuk mengisolasi Myanmar (Arif, 2021). Konsep Constructive Engagement adalah upaya ASEAN untuk mendorong demokrasi dengan cara yang tidak melanggar prinsip non-intervensi, namun efektivitasnya dipertanyakan secara luas. Sulit untuk memutuskan bagaimana menangani situasi di Myanmar, hak asasi manusia dan keadilan sosial harus tetap menjadi prioritas utama. Di luar prinsip non-intervensi, ASEAN harus mencari cara kreatif untuk mendukung perubahan positif di Myanmar guna membantu masyarakat yang menderita karena kebijakan otoriter.

Upaya kudeta junta militer dan perluasan otorisasi dari tahun 1962 hingga 2021 lalu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Myanmar masih memiliki relevansi kuat terhadap teori realisme. Biasanya, kudeta militer dilaksanakan ketika tidak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah berkuasa (Nordlinger, 1990). Namun, dilihat dari kasus Myanmar menandakan bahwa pihak militer tetap ingin menegakkan kekuasaan otoriter beralih demokrasi. Berdasarkan karya Thucydides berjudul *The Peloponnesian War*, menjelaskan bahwa peperangan antara Athena dan Sparta diawali oleh rasa kekhawatiran Sparta terhadap Athena yang melakukan pembangunan militer, sehingga Sparta takut kehilangan pengaruh di Liga Hellenic dan menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan sebagai pemicu perang (Hadiwinata, 2018). Persis seperti pihak demokrasi Aung San Suu Kyi dan pihak militer dipimpin Ming Aung Hlaing yang takut terhadap kekuatan pihak oposisi semakin berkembang dan berusaha menghilangkan pengaruh salah satu pihak dengan berbagai cara. Seperti tema penelitian kali ini, upaya penghapusan pengaruh pihak oposisi dilakukan dengan cara kudeta militer pemimpin kudeta, yaitu Min Aung Hlaing dan pihak pro-militernya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif menjelaskan penelitian dengan menggunakan bahasa atau kata-kata, bukan angka. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan. Maka penelitian ini akan membahas mengenai analisis kudeta militer Myanmar melalui perspektif realisme.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode library research, yaitu metode dengan pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, media massa, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dan lain sebagainya (Hakiem, Indrasari, & Hasanah, 2022).

Sebagai respon terhadap kudeta militer di Myanmar, serta aturan internasional yang ketat dalam intervensi politik suatu negara berdaulat, seringkali menjadi kendala dalam penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut. Oleh karenanya perlu menganalisis suatu tindakan yang tidak hanya dilihat dari bagaimana menyelesaikan konflik langsung, namun juga perlu melihat bagaimana kekuatan militer dan kepentingan nasional mempengaruhi stabilitas politik yang terjadi di Myanmar. Sehingga, hal ini telah melatarbelakangi fokus penelitian penulis dengan mengkaji "Bagaimana perspektif

realisme dapat menganalisis penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah militer Myanmar untuk mempertahankan kekuasaan, serta mengapa pemerintah militer Myanmar cenderung mengabaikan kecaman internasional dalam memprioritaskan kepentingan nasional meskipun berdampak negatif terhadap hak asasi manusia dan demokrasi?".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kudeta militer Myanmar merupakan aksi politik internasional yang menggemparkan serta berhasil menarik perhatian para aktor internasional untuk memerhatikan sikap Myanmar. Kudeta merupakan kunci bagi perwira militer untuk mengambil alih kekuasaan negara (Yasa, 2022). Kudeta terakhir yang dilakukan Myanmar dilakukan pada 1 Februari 2021 akibat kemenangan partai demokrasi National League for Democracy (NLD) yang dinilai pihak militer melakukan kecurangan sehingga terjadinya kudeta dengan melakukan penahanan terhadap para tokoh pro-demokrasi, seperti Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh senior lainnya (Arif, 2016). Seperti yang sudah diketahui publik dunia, bahwa keadaan Myanmar pasca kudeta dipimpin oleh panglima tertinggi militer yaitu Min Aung Hlaing.

Kondisi Myanmar menjadi tidak kondusif dan dikejar rasa ketakutan akan kematian terhadap penolakan otorisasi pemerintahan militer Myanmar. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak warga negara Myanmar melakukan emigrasi atau pengungsian ke negara-negara tetangga, bahkan UNICEF mencatat lebih dari 1,5 juta masyarakat Myanmar terpaksa mengungsi demi mencari keamanan dari rasa ketakutan yang terus-menerus meneror tanpa henti. Sikap junta militer Myanmar terhadap warga negaranya sendiri sukses membuktikan karakteristik realisme identik sebagai penguasa absolut yang mengumpulkan kekuasaan dan kontrol politik agar ditakuti rakyat. (Hadiwinata, 2018). Demonstrasi dan pengungsian warga negara Myanmar merupakan reaksi atas ketidakpuasan aksi kudeta militer Myanmar, namun dalam situasi realisme lebih penting bagi penguasa junta militer untuk "ditakuti" meski tidak "dihormati" rakyatnya sendiri (Hadiwinata, 2018).

Perspektif E.H. Carr: Tidak Ada Moralitas dalam Politik Internasional

Analisis kudeta militer Myanmar yang mengacu pada pandangan realisme klasik E.H. Carr menggambarkan bahwa Myanmar secara tidak langsung melakukan klaim bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional dan bersifat anarkis. Anarkis yang dimaksud bahwa setiap negara harus memprioritaskan kepentingan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer (Hadiwinata, 2018). Sejak 1 Februari 2021 tepat saat terjadinya kudeta militer Myanmar hingga Maret 2021, sebanyak 183 orang tewas dibunuh aparat militer Myanmar (CNN Indonesia, 2021). Lembaga yang memantau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan bahwa sikap aparat militer Myanmar semakin tidak terkendali terhadap demonstran pro-demokrasi. Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, yaitu Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) bahwa sejak kepemimpinan junta militer sudah memakan korban lebih dari 3 ribu orang dan penangkapan sebanyak 24.100. Pandangan Carr terhadap moralitas semakin diperkuat dan ditegaskan bahwa hal tersebut tidak masuk akal karena hanya ada keberlangsungan yang paling fit (Hadiwinata, 2018). Hal tersebut membuktikan keinginan pemerintah Myanmar yang ingin melakukan penguatan kekuasaan sebagai otoritas paling tinggi dan menaklukkan rakyat meski dengan cara kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Manifestasi lain dari sikap Myanmar terhadap realisme adalah tidak adanya moralitas dalam politik internasional dan bisa dilihat dari ribuan korban nyawa melayang akibat protes terhadap kudeta militer Myanmar sehingga sudah jelas bahwa Myanmar mengabaikan instrumen-instrumen kemanusiaan.

Perspektif E.H. Carr: Kekuasaan sebagai Kekuatan Militer

Berdasarkan pandangan realis, Myanmar merupakan negara kuat dan tidak pernah gagal. Hal ini dibuktikan dari kekuatan militer Myanmar yang bisa dikatakan sangat kuat (Kusumah, 2010). Berdasarkan data Global Fire Water 2021, kekuatan militer Myanmar menduduki peringkat 38 dari 140 negara. Pertahanan udara Myanmar memiliki 287 pesawat militer; 60 pesawat jet tempur, 5 pesawat misi khusus, 86 helikopter, dan 9 helikopter serang. Selain itu pertahanan darat Myanmar memiliki 595 tank, 1.700 kendaraan lapis baja, 40 artileri otomatis, 1.869 artileri manual, dan 496 proyektor roket. Pertahanan lainnya dari segi kelautan, Myanmar memiliki 187 aset militer; 5 kapal fregat, 3 kapal korvet, 1 kapal selam, 79 kapal patroli, dan 2 kapal perang ranjau. Berdasarkan data di atas, bukanlah ketidakmungkinan bahwa militer Myanmar memiliki kepercayaan diri untuk melakukan kudeta.

Kekuatan militer Myanmar yang kuat telah memenuhi salah satu syarat unsur politik internasional milik Carr, yaitu hakikat dari politik internasional ialah kekuatan militer sebagai salah satu unsur (Hadiwinata, 2018). Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, telah lama menggunakan kekuatan militer sebagai alat utama politik dalam negeri dan hubungan internasional. Selama beberapa dekade, militer Myanmar memainkan peran dominan dalam pemerintahan negara tersebut dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik dan konflik internal. Pandangan Carr tentang penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik mencerminkan pendekatan realis terhadap hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Myanmar sama seperti beberapa negara lain, yaitu menerapkan pendekatan yang realistis mengingat pentingnya memiliki kekuatan militer yang kuat sebagai sarana untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Meskipun terjadi perubahan dan reformasi politik di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, militer Myanmar terus memainkan peran penting dalam pemerintahan dan kebijakan luar negeri negara tersebut yang mencerminkan unsur utama politik internasional milik E.H. Carr.

Perspektif E.H. Carr: Harmoni Kepentingan

Prinsip Carr lainnya yang memiliki relevansi bahwa adalah aktor utama internasional, yaitu bahwasanya prinsip harmoni kepentingan (Harmony of Interest) hanya disuntikkan pada sekelompok elit pribadi atau pemegang kepentingan (stakeholder) dan penguasa negara dari negara perang (Fachrie, 2021). Analisis pertama realisme terhadap keselarasan kepentingan bahwa nyatanya Myanmar tengah melawan rakyatnya sendiri, di mana Myanmar memandang kekuasaan pemerintah sebagai aktor utama dan mengabaikan hak-hak asasi manusia demi mencapai kekuasaan tertinggi pemerintahan. Aksi nyata yang dapat diimplementasikan yaitu data aktual bahwa Myanmar memang melakukan tindak kudeta militer berkali-kali dan berusaha menjegal demokratisasi yang ingin dicapai mayoritas penduduk Myanmar. Analisis kedua realisme terhadap keselarasan kepentingan yakni Myanmar mengabaikan kecaman internasional terhadap aksi kudeta yang dijalankan 2021 lalu. Mulai dari negara superpower (adidaya) Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan yang membekukan kerja sama bidang pertahanan, Jepang melakukan pemberhentian bantuan hingga organisasi internasional PBB dan organisasi kawasan yakni ASEAN seolah tidak mendapat tanggapan serius dari Myanmar. Hingga saat ini, 2023, pemerintah Myanmar masih dipimpin oleh elit militer Min Aung Hlaing. Bisa dilihat bahwa solidaritas internasional tidak mampu mengguncang pemerintahan militer Myanmar sepenuhnya dan tetap berpegang teguh pada prinsip negara anarki dan otoriter serta mengabaikan korban nyawa dan emigrasi masyarakat Myanmar ke negara tetangga demi menghindari ancaman kematian dari pemerintah mereka sendiri.

30 Agustus 2003 pemerintah Myanmar merancang dan mempublikasikan kebijakan

bernama *Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy* sebagai salah satu langkah awal menciptakan demokrasi. Namun dilihat dari kondisi Myanmar sekarang ini, kebijakan tersebut merupakan tanggapan pemerintah untuk mengurangi tekanan baik dari masyarakat hingga internasional tanpa harus melepaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin NLD lainnya dari penahanan yang dilakukan pemerintah militer (ALTSEAN BURMA, 2004). Kebijakan tersebut tidak lepas dari kontra masyarakat yang menilai bahwa kebijakan tersebut sebagai media untuk memperkuat atau mempertahankan posisi militer Myanmar agar tidak lengser dan meredam tekanan masyarakat dan pihak internasional. Kebijakan di atas berkaitan dengan konsep harmoni kepentingan, di mana kebijakan tersebut lebih menguntungkan segelintir orang demi tujuan tertentu. Dalam konteks harmoni kepentingan ini, Myanmar lebih vokal melawan rakyatnya sendiri daripada merespon negara lain terhadap aksi kudetanya.

Perspektif E.H. Carr: Analisis Penundaan Pemilu Myanmar melalui Pendekatan Harmoni Kepentingan dan Unsur Utama Politik Internasional

Pemimpin pemerintah militer Myanmar, yaitu junta Min Aung Hlaing mengumumkan peresmian penundaan pemilihan umum tahun 2023 ini (CNBC Indonesia, 2023). Pada 2021 lalu, junta militer sempat menjanjikan pemilihan umum. Alasan yang diberikan junta militer terhadap penundaannya yaitu bahwa kondisi Myanmar sekarang ini masih tidak kondusif karena kekerasan masih terjadi di Myanmar dan ketidakinginan terjadinya demonstrasi ketika pemilu berlangsung. Pemimpin junta Myanmar mengklaim bahwa beliau menginginkan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta masyarakat bisa memberikan suara tanpa rasa takut (<https://antaranews.com>). Oleh karena itu, pemerintah Myanmar resmi menunda pemilihan umum dan memperpanjang status darurat hingga enam bulan ke depan akibat keributan yang riskan terjadi di negaranya. Dilansir dari CNN Indonesia pada 2 Agustus 2023, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa penundaan pemilihan umum yang dilakukan Myanmar ini merupakan proses internal yang semakin memperlambat pemulihan demokrasi di negara tersebut.

Aksi penundaan pemilihan umum Myanmar tentu mengundang kontra dan kekesalan dari berbagai pihak. Myanmar dinilai tetap ingin mempertahankan kekuasaan sebagai negara di bawah pengaturan militer dan ingin menyingkirkan demokrasi dari negara Myanmar sepenuhnya. Hal ini bisa ditelaah melalui kacamata kaum realis melalui prinsip kekuatan militer sebagai unsur utama politik internasional dan prinsip harmoni kepentingan. Kekuatan militer Myanmar yang menduduki 38 dari 140 negara menandakan bahwa cukup untuk melakukan aksi kudeta dan melakukan kewenangan pribadi terhadap masyarakat apabila tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan rakyat. Hal tersebut bisa divalidasi melalui korban nyawa yang mencapai 3 ribu orang lebih dan penangkapan sebanyak 24.100 orang dan penahanan sekitar 17.000 (DW Indonesia, 2023). Respon pemerintah terhadap demonstrasi rakyat Myanmar cukup membuktikan bahwa Myanmar memiliki kekuatan militer memadai hingga 3 tahun berlalu militer Myanmar masih menduduki bangku pemerintahan. Sedangkan menurut pandangan kaum realis melalui kacamata harmoni kepentingan, Myanmar menunjukkan indikasi egosentrik terhadap kepentingan nasionalnya, di mana negara tersebut tetap berdiri kokoh sampai saat ini sebagai negara di bawah naungan militer. Sikap egosentris melekat terhadap militer Myanmar yang tidak ingin dilengserkan hingga memanjangkan status darurat hingga enam bulan ke depan dan mengabaikan respon internasional semata-mata demi mempertahankan pemerintahan militer dan melangsungkan kepentingan nasionalnya.

KESIMPULAN

Myanmar adalah negara berkembang sekaligus anggota kawasan organisasi regional ASEAN dengan kekuatan militer memadai. Fakta menunjukkan bahwa kondisi Myanmar masih jatuh-bangun dari kudeta militer yang sampai sekarang masih memegang posisi kuat di pemerintahan militer. Aksi demonstrasi dan kecaman internasional nyatanya sampai sekarang belum mampu melengserkan pemerintahan militer Myanmar yang bahkan resmi mengumumkan peresmian penundaan pemilihan umum dan perpanjangan status darurat sampai enam bulan ke depan. Pihak internasional tidak bisa melakukan intervensi terang-terangan karena akan memicu peperangan, apalagi anggota kawasan ASEAN yang memiliki prinsip non-intervensi.

Aksi kudeta militer Myanmar merupakan refleksi sempurna dari teori hubungan internasional yaitu realisme, di mana realisme cenderung menggambarkan negara sebagai sosok egosentris, anarki, dan melekat terhadap militer. Analisis kudeta militer Myanmar memiliki pendekatan yang baik karena aksi-aksi yang dilakukan Myanmar secara garis besar memiliki persamaan besar terhadap sudut pandang realisme yang memandang negara sebagai aktor utama internasional. Myanmar non-vokal menyatakan bahwa negara adalah aktor utama internasional yang anarki, di mana tidak ada otorisasi yang lebih tinggi daripada negara itu sendiri. Selain itu, secara vokal Myanmar mengabaikan instrumen kemanusiaan dan tidak segan melakukan eksekusi terhadap pihak pro-demokrasi sehingga memakan ribuan korban nyawa dan penangkapan mencapai puluhan ribu.

Penulis berharap besar pada respon internasional dalam menanggapi aksi kudeta militer Myanmar dan meningkatkan intensitas kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia yang terabaikan di Myanmar. Selain itu, ASEAN diharapkan bisa menjadi jembatan penuh antara Myanmar dan pihak internasional untuk mencari jalan tengah bagi kemerdekaan penuh Myanmar tanpa adanya pertumpahan darah. Penulis berharap bahwa ASEAN dan pihak internasional bisa melakukan diplomasi intens terhadap Myanmar dan meniadakan pemerintahan militer serta membebaskan rakyat dari belenggu ketakutan dan menjadikan Myanmar negara yang merdeka baik secara internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alternative ASEAN Network on Burma. (2020, November). Burma Breiefing: Issues and Concerns Volume 1.
- Anadolu Agency Indonesia. (2022, July 27). PBB Kecam Eksekusi Aktivistis dan Desak Pembebasan Semua Tahanan Politik di Myanmar. Retrieved from Anadolu Agency Indonesia: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-kecam-eksekusi-aktivis-dan-desak-pembebasan-semua-tahanan-politik-di-myanmar/2645775>
- Arif, A. M. (2016). Analisis Demokratisasi di Myanmar Tahun 2003-2011. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- Azizah, H. Z. RR. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. Volume 6, Nomor 3, 96-97. Universitas Pertahanan.
- BBC Indonesia. (2020, November 13). Myanmar: Partai Aung San Suu Kyi Kembali Menang dalam Pemilu. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54928325>
- Buzan, Barry. (1991). People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post - Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- CNBC Indonesia. (2023, August 02). Status Darurat Diperpanjang, Pemilu Myanmar Ditunda. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230802093731-8-459422/video-status-darurat-diperpanjang-pemilu-myanmar-ditunda>
- CNN Indonesia. (2021, March 16). Aparat Myanmar Kian Brutal, 183 Orang Tewas Dibunuh. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210316094111-106-617929/aparat->

myanmar-kian-brutal-183-orang-tewas-dibunuh
CNN Indonesia. (2023, August 01). Junta Militer Myanmar Resmi Tunda Pemilu. Retrieved from
CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230801114053-106-980363/junta-militer-myanmar-resmi-tunda-pemilu>
CNN Indonesia. (2023, August 02). Kemlu RI Soal Junta Tunda Pemilu Myanmar: Memperlambat
Demokrasi. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230802100735-106-980823/kemlu-ri-soal-junta-tunda-pemilu-myanmar-memperlambat-demokrasi>